

**PENGARUH DANA DESA DAN BELANJA MODAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN
PADA PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA BARAT, DAN
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2018**

RINGKASAN SKRIPSI



**RIZKY RAHADIAN PUTRA
3118 30507**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

Pengaruh Dana Desa dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2018

Telah diajukan untuk diuji pada tanggal 10 Juni 2020, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian atau karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Yogyakarta, 10 Juni 2020

Yang memberi pernyataan

Nama : Rizky Rahadian Putra

NIM : 3118 30507

SKRIPSI

PENGARUH DANA DESA DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN PADA PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA BARAT, DAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2018

Dipersiapkan dan disusun oleh:

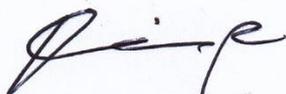
RIZKY RAHADIAN PUTRA

No Induk Mahasiswa: 311830507

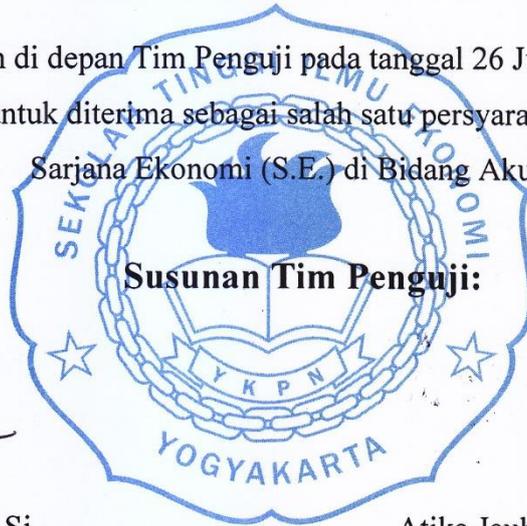
telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 26 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

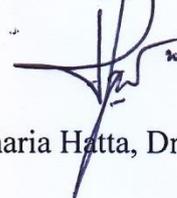
Pembimbing I



Rudy Badrudin, Dr., M.Si.



Penguji



Atika Jauharia Hatta, Dr., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 26 Juni 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Harsono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGARUH DANA DESA DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN PADA PULAU JAWA, BALI, NUSA TENGGARA BARAT, DAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2018

Rizky Rahadian Putra
3118 30507

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari dana desa dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berwujud laporan rincian dana desa, laporan realisasi Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD), dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur periode 2015 sampai dengan 2018 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Sampel penelitian yang diuji berasal dari kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur periode 2015 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil pengujian tersebut memperoleh hasil bahwa dana desa dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Dana Desa, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh yang besar untuk kenaikan perekonomian setiap daerah ialah pertumbuhan ekonomi. Karena hal itu pemerintah berkewajiban mengelola sebaik mungkin agar mewujudkan hal tersebut. Pertumbuhan ekonomi termasuk tahapan yang dapat menjadikan suatu perubahan perekonomian pada suatu daerah secara berkelanjutan dalam tujuan menjadikan kondisi yang lebih unggul dari sebelumnya sekaligus merupakan tujuan pembangunan perekonomian yang diharapkan oleh setiap negara.

Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah akan berupaya melakukan pengelolaan sebaik mungkin terhadap barang dan jasa yang telah diproduksi oleh masyarakat agar terus bertambah di mana akan memacu peningkatan kegiatan perekonomian daerah. Upaya tersebut dilakukan karena melalui bertambahnya kapasitas produksi akan berpotensi terhadap kenaikan *output* nasional di mana pengaruh jangka panjangnya akan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah bahkan pertumbuhan ekonomi nasional dalam suatu negara. Indonesia di mana termasuk negara berkembang masih terus berusaha dalam upaya peningkatan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pertumbuhan ekonomi agar dapat mewujudkan targetnya menjadi negara maju dan menyusul negara lainnya.

Untuk mencapai pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang baik di Indonesia dapat dimulai dari pedesaan. Dikarenakan ada beberapa alasan. Pertama, hampir semua orang Indonesia hidup di daerah pedesaan. Kedua, masih terdapat beberapa masalah perekonomian mendasar di negara ini, seperti kemiskinan, rendah pendidikan, kesehatan yang buruk, serta sarana dan prasarana yang tidak memadai yang sebagian besar terdapat di wilayah desa. Ketiga, adanya ketimpangan pembangunan ekonomi yang berbeda – beda pada setiap wilayah desa di mana dapat berdampak terhadap tingkat pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dibangunnya reformasi pemahaman dengan memberikan perhatian lebih besar pada pembangunan setiap desa oleh pemerintah daerah agar dapat mewujudkan strategi pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang lebih baik yang untuk mengatasi adanya ketimpangan – ketimpangan tersebut pada wilayah desa di mana memiliki posisi strategis di Indonesia. Bahkan jika wilayah desa sudah maju maka negara bisa juga dikatakan maju.

Agar dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah mengesahkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjalankan otoritas mengatur serta mengelola pemerintahan dan kepentingan rakyat. Peran dana desa yaitu bertujuan agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan terwujudnya pemerataan yang lebih baik dalam pertumbuhan dan pembangunan desa dengan menerapkan peningkatan layanan publik desa, menaikkan ekonomi desa, menangani kesenjangan yang terjadi pada pembangunan desa dan penguatan masyarakat desa di mana dalam hal ini dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan desa. Diharapkan dari adanya dana desa dapat meningkatkan pembangunan daerah di mana pemerintah daerah akan mendapatkan alokasi dana yang dipergunakan sebagai biaya pengembangan modal daerahnya.

Pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pengembangan ekonomi dalam suatu daerah tertentu juga menggunakan adanya belanja modal. Belanja modal adalah alokasi yang diolah pemerintah daerah bertujuan agar dapat membiayai dalam kegiatan pembangunan yang dikhususkan untuk kepentingan umum. Belanja modal tersebut menghasilkan pembangunan fasilitas umum berupa jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, rumah sakit dan gedung sekolah serta berbagai fasilitas umum lainnya yang memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat (Badrudin, 2017).

Namun terlepas dari hal tersebut, masih terdapat suatu masalah pengeluaran pemerintah terlebih belanja modal di mana pada saat ini belum memperoleh perhatian yang baik oleh pemerintah sehingga diharapkan untuk selanjutnya lebih diprioritaskan dan diperhatikan, dikarenakan anggaran pemerintah pada kenyataannya lebih besar jumlahnya untuk belanja pegawai dibandingkan belanja modal. Maka hal itu, mengakibatkan kurangnya kualitas pelayanan publik dan pembangunan suatu daerah kurang mempengaruhi secara signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana desa dan belanja modal dapat dikatakan sumber pendanaan yang berbeda namun keduanya dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa mengurangi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah. Hal tersebut, berkaitan dengan peran pemerintah daerah di mana berkewajiban untuk dapat mengelola sebaik mungkin agar dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

TINJAUAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi ialah suatu persetujuan (kontrak) bersama yang telah dibuat oleh kedua pihak dan menjelaskan hubungan di antara mereka yang salah satunya bersumber dari suatu teori organisasi, teori sosiologi, teori keputusan, dan teori ekonomi. Kedua pihak tersebut adalah principal dan agen, di mana pihak principal memberikan wewenang dan pertanggung jawaban terhadap suatu kontrak pada pihak agen agar pihak agen dapat mewujudkan pekerjaan yang diinginkan oleh pihak principal (Jensen dan Meckling, 1976).

Tujuan adanya teori agensi ini adalah menganalisis suatu susunan persetujuan (kontrak) pada dua atau lebih individu, organisasi, ataupun kelompok. Biasanya, teori agensi dipraktikkan pada organisasi publik terutama pemerintah daerah. Berdasar sektor publik tersebut, pemerintah daerah berperan sebagai pihak agen dan masyarakat berperan sebagai pihak principal yang diwakilkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Seharusnya peran pihak agen (pemerintah daerah) diharapkan dapat melayani sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan oleh pihak principal (masyarakat). Namun terkadang hal itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat, di mana pemerintah daerah mengambil tindakan sendiri terkait pada sektor publik tanpa adanya perwujudan keinginan dari masyarakat.

Dalam kaitannya oleh penelitian ini dalam hal teori agensi tersebut adalah keterkaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di mana penyaluran dana pada masyarakat di wakikan melalui peran DPRD sebagai pihak principal dan pemerintah daerah sebagai pihak agen. Pelimpahan tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengelola daerah yang memiliki dampak terhadap penyaluran dana yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan dana pada kebutuhan pemerintahan setiap harinya serta memenuhi fasilitas publik kepada masyarakat. Peran pihak principal (masyarakat) telah memberikan kontribusi terhadap pihak principal (pemerintah daerah) yaitu berupa pembayaran pajak, retribusi pajak, dan kontribusi pajak lainnya bertujuan untuk menaikkan pendapatan daerahnya. Berdasar akan hal itu, maka pihak principal (pemerintah daerah) seharusnya dapat memberikan timbal balik berupa kontribusi dana kepada pihak agen (masyarakat) dalam pengembangan fasilitas publik.

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal ialah penyerahan tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah pusat mengenai urusan pemerintahan kepada pemerintah yang lebih

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rendah yaitu pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Desentralisasi fiskal memiliki beberapa fungsi utama yaitu dapat meningkatkan sektor publik menjadi lebih efisien dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi menjadi jangka panjang (Faridi, 2011). Desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah seharusnya dapat mampu untuk menyediakan fasilitas publik yang baik untuk masyarakat pada daerah tersebut. Desentralisasi fiskal dapat memberikan beberapa keuntungan dalam pengelolaan pada sektor publik terlebih akuntabilitas, pertumbuhan, dan responsivitas pemerintah terhadap adanya tuntutan kebutuhan dan tuntutan lokal (Amagoh dan Amin, 2012).

Teori Pembangunan Ekonomi

Teori pembangunan ekonomi ialah peran pemerintah untuk mewujudkan segala aspek mengenai pembangunan ekonomi pada daerahnya seperti halnya pengembangan pada pembangunan infrastruktur, fasilitas, serta pembangunan mengenai pemerataan pembangunan lainnya terhadap masyarakat. Pembangunan tersebut bertujuan untuk upaya meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Tindakan pada pembangunan – pembangunan tersebut menyebabkan adanya pembangunan ekonomi dikarenakan masyarakat secara langsung dapat memenuhi sekaligus meningkatkan pengelolaan barang dan jasa yang diproduksi pada daerah tersebut.

Menurut teori Adam Smith, dalam membangun pertumbuhan ekonomi terdapat dua komponen utama yaitu pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan tingkat penduduk. Bagian utama dalam pertumbuhan *output* total yaitu sumber daya alam, stok barang modal yang tersedia, dan jumlah penduduk (Arsyad, 2010). Tolok ukur sebagai batas maksimum dalam pertumbuhan ekonomi diperoleh melalui jumlah dari sumber daya alam yang berarti jika sumber daya alam belum digunakan dengan optimal, maka jumlah dari stok barang modal dan penduduk yang memiliki peran pada pertumbuhan *output* total. Jika pertumbuhan *output* total sudah tidak digunakan, maka sumber daya alam tersebut sudah bekerja dengan optimal.

Stok barang modal termasuk komponen produksi yang berperan aktif dalam mempengaruhi pertumbuhan *output* total. Peran stok barang modal pada pertumbuhan *output* total terdiri dari secara langsung dan secara tak langsung. Apabila secara langsung yaitu adanya penambahan stok barang modal yang akan mempengaruhi secara langsung terhadap peningkatan tingkat *output*. Apabila secara tak langsung yaitu adanya peningkatan terhadap produktivitas stok barang modal yang dimungkinkan beberapa faktor seperti adanya pembagian kerja dan spesialisasi. Berdasar hal tersebut, dapat memperlancar proses peningkatan pembangunan ekonomi dikarenakan faktor spesialisasi akan mempengaruhi terhadap peningkatan daya produksi pada tenaga kerja sekaligus dapat memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006).

Seperti Sukirno (2006) menjelaskan bahwa apabila pembangunan ekonomi telah dilaksanakan maka pembangunan tersebut dapat bekerja dengan konstan dan kumulatif. Spesialisasi, perkembangan dalam pasar, dan pembagian kerja akan menyebabkan kenaikan pendapatan nasional dan produktivitas. Peningkatan jumlah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penduduk dan pendapatan nasional secara bersamaan dapat memperluas pasar dan menghasilkan tabungan sebagai kebutuhan investasi. Proses tersebut yang dilakukan secara konstan akan menyebabkan perkembangan ekonomi dan dapat menaikkan pendapatan per kapita.

Selanjutnya, teori Harrod Domar yang merupakan perkembangan dari teori yang telah dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Berdasar teori yang telah dikembangkan tersebut, kurang memberikan penjelasan secara lengkap dikarenakan dalam teori tersebut belum menjelaskan beberapa masalah ekonomi periode jangka panjang, sedangkan teori yang dikembangkan oleh Harrod Domar menganalisa beberapa kriteria yang digunakan untuk perekonomian agar dapat berkembang dan tumbuh dalam periode jangka panjang. Hukum Klasik memberikan pendapat bahwa penambahan jumlah barang modal dalam masyarakat disebabkan oleh pembentukan barang modal yang merupakan suatu pengeluaran. Berdasar penambahan jumlah barang itu, dapat menaikkan pendapatan nasional dan jumlah produksi sehingga mewujudkan pembangunan ekonomi atas dasar Hukum Klasik yaitu *supply creates its own demand*. Pembentukan barang modal bertujuan untuk meningkatkan kesanggupan dalam perekonomian agar dapat menghasilkan barang dan meningkatkan permintaan efektif terhadap masyarakat.

Teori selanjutnya yaitu, teori Nicholas Kaldor di mana menurut Djojohadikusumo (1994) merupakan suatu kombinasi yang memiliki sifat berinteraksi pada metode deduksi dengan metode induksi. Metode deduksi dapat disebut sebagai pendekatan rasional empiris, di mana metode ini diawali oleh masalah tertentu lalu masalah tersebut dikaji secara teoritis dan dicari atas dasar rasional. Sedangkan, pada metode induksi yang disebut sebagai pendekatan empiris rasional, di mana metode ini diawali oleh pengumpulan data bersifat empiris, tanpa adanya masalah tertentu.

Terdapat dua sisi pendekatan terhadap teori tersebut melalui *stylized facts*, sisi yang pertama yaitu dapat menghubungkan adanya disparitas antara Neo Klasik dengan Neo Keynes. Sisi yang kedua yaitu berkembangnya pemikiran oleh Nicholas Kaldor terhadap pertumbuhan ekonomi yang semakin mengarah menuju pemikiran yang memuat masalah – masalah dalam pembangunan ekonomi. Beberapa masalah yang penting pada pembangunan ekonomi negara berkembang juga menyangkut terhadap pembahasan tentang pertumbuhan antar sektor dan pertumbuhan antar regional.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yaitu suatu perubahan kenaikan dalam jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau *Gross National Product* (GNP) yang melingkupi bermacam perubahan tanpa melihat perubahan sistem ekonomi dan naik turunnya tingkat pertumbuhan penduduk dalam kegiatan perekonomian yang berlaku dalam satu tahun tertentu dengan tahun selanjutnya. Agar perubahan yang dilakukan tersebut dapat diketahui, maka harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional antara tahun tertentu ke tahun selanjutnya yang dapat disebut sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat dikatakan pada suatu daerah apabila dalam kegiatan perekonomiannya mendapati peningkatan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang signifikan dari tahun ke tahun, sebaliknya apabila kegiatan perekonomian tersebut mengalami fluktuatif atau penurunan dari tahun ke tahun maka daerah tersebut dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Faktor – faktor yang menyebabkan adanya kenaikan pada pertumbuhan ekonomi ialah penambahan penyediaan dalam faktor produksi seperti teknologi, tenaga kerja, akumulasi modal, dan penduduk. Berdasar beberapa faktor tersebut, terdapat faktor utama yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal. Demikian juga peran belanja modal dalam pertumbuhan ekonomi yang anggarannya ditetapkan oleh pemerintah daerah, semakin besar anggaran untuk mendanai belanja modal maka seharusnya dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan juga sebagai suatu peningkatan aktifitas terhadap perekonomian daerah yang memicu barang dan jasa yang telah diproduksi oleh masyarakat sekaligus peningkatan terhadap kemakmuran masyarakat.

Belanja Modal

Belanja modal yaitu belanja yang dikeluarkan sebagai anggaran oleh pemerintah daerah untuk memadai manfaat maupun fasilitas masyarakat berupa pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai ekonomis lebih dari satu periode akuntansi dan berdampak pada daerah tersebut terhadap penambahan aset. Pembangunan infrastruktur dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat seperti jembatan, jalan, telekomunikasi, jembatan, rumah sakit dan gedung sekolah, pasar, listrik, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Belanja modal juga meliputi penambahan aset tetap antara lain atas perolehan tanah, bangunan dan gedung, aset tetap lainnya. Belanja modal juga bertanggung jawab atas adanya pengeluaran yang digunakan untuk biaya pemeliharaan bersifat rutin dalam memperkuat maupun menambah waktu manfaat, menaikkan kapasitas, dan kualitas terhadap aset tetap pemerintah daerah.

Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang dihasilkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikhususkan untuk desa yang dikirim dengan menggunakan perantara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wilayah kabupaten/kota dan dipergunakan sebagai pembiayaan kegiatan pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyelenggaraan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Tujuan adanya dana desa yaitu membantu pemerintah daerah agar dapat mewujudkan kebijakan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini akan menguji dan menganalisis pengaruh dana desa dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan rumusan hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengadaan dana desa digunakan oleh pemerintah daerah sebagai tolok ukur dan untuk mewujudkan pembiayaan kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kegiatan penyelenggaraan, pemberdayaan, dan kepentingan dalam lingkup masyarakat pada setiap desa. Pengelolaan terhadap dana desa oleh pemerintah daerah jika diwujudkan secara maksimal mungkin, maka dapat mendorong sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang diteliti oleh Atmojo, Fridayani, Kasiwi dan Pratama, (2017) memperoleh hasil bahwa penggunaan dana desa berpengaruh sangat efektif terhadap pengembangan ekonomi yang berfungsi pada pemberdayaan masyarakat dan dapat memacu peningkatan ekonomi desa. Pada penelitian Rimawan dan Aryani (2019) memperoleh hasil bahwa alokasi dana desa dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Badrudin (2019) memperoleh hasil bahwa alokasi dana desa memberikan pengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasar penjelasan hasil – hasil penelitian tersebut, maka dapat diperoleh rumus hipotesis sebagai berikut:

H₁: Dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015-2018.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah daerah melakukan belanja modal bertujuan untuk mengelola perekonomian dalam upaya menambah aset ataupun kekayaan daerah bersifat rutin untuk digunakan sebagai kegiatan pemerintahan daerah. Peningkatan terhadap belanja modal akan menjadikan faktor pendorong terciptanya investasi baru agar dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal dan juga pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah. Jika hal tersebut dilakukan dengan baik, maka dapat memacu pertumbuhan perekonomian pada daerah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Pambudy dan Syairozi (2019), Rizky, Agustin, dan Mukhlis (2016), Nurmainah (2013), dan Astria (2014) memperoleh hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemudian hal tersebut sejalan dengan penelitian Astria, Palar, dan Sumual (2016) yang memperoleh hasil bahwa belanja modal memperoleh pengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pada penelitian Hakim dan Wijayanti (2014) menjelaskan bahwa belanja modal pemerintah berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal lainnya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun belanja modal pada pemerintah berupa belanja gedung dan bangunan, serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian Sondakh, Lapian, dan Siwu (2017) yang memperoleh hasil bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, beberapa hasil hipotesis tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sita (2017), Fajri (2016), serta Dewi dan Suputra (2017). Penelitian Sita (2017) memperoleh hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, berdasar hal tersebut dikuatkan dengan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

hasil yang diperoleh dalam penelitian Fajri (2016) yang memperoleh hasil bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada penelitian Dewi dan Suputra (2017) yang memperoleh hasil bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasar penjelasan beberapa penelitian tersebut, maka dapat diperoleh rumus hipotesis sebagai berikut:

H₂: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015-2018.

METODE PENELITIAN

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah:

1. Sampel yang digunakan hanya berasal dari kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur periode waktu 2015 sampai dengan 2018.
2. Laporan keuangan pada pemerintah dalam kabupaten yang digunakan sebagai sampel harus tidak terintegrasi dengan laporan keuangan pada pemerintah dalam provinsi.
3. Kabupaten yang digunakan sebagai sampel harus sudah menjadi daerah otonom sebelum tahun 2014 agar menghindari bias terhadap neraca awal laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Data yang digunakan harus tersedia dan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk tahun pengamatan 2015 sampai dengan 2018.

Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif berupa data jumlah belanja modal, data jumlah alokasi dana desa, dan data jumlah laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur tahun 2015 sampai dengan 2018. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi dari data sekunder berwujud laporan rincian dana desa, laporan realisasi APBD, dan data PDRB di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur periode 2015 sampai dengan 2018 yang telah dipublikasikan oleh BPS Indonesia. Laporan dan data yang digunakan untuk pengumpulan data diperoleh melalui unduhan pada website resmi BPS Indonesia (<http://www.bps.go.id/>).

Variabel Independen

Dana Desa

Pengukuran untuk memperoleh data pada dana desa dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi + Alokasi Formula

Belanja Modal

Pengukuran untuk memperoleh data pada belanja modal dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Variabel Dependen

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pengukuran untuk memperoleh data pada pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PDRB_t$: Produk domestik regional bruto pada tahun yang terkait

$PDRB_{t-1}$: Produk domestik regional bruto satu tahun sebelum tahun terkait

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Data sekunder yang telah dihimpun oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 121 kabupaten di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang telah terdaftar pada website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia dalam pengamatan selama 4 tahun yaitu periode 2015 sampai dengan 2018. Pada Pulau Jawa terdiri dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jumlah kabupaten yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini yaitu 4 kabupaten pada Provinsi Banten, 18 kabupaten pada Provinsi Jawa Barat, 29 kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah, 4 kabupaten pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 29 kabupaten pada Provinsi Jawa Timur, 8 kabupaten pada Pulau Bali, 8 kabupaten pada Pulau Nusa Tenggara Barat, dan 21 kabupaten pada Pulau Nusa Tenggara Timur.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis Statistika Deskriptif

Variabel	Jumlah Data	Minimum	Maksimum	Rata – Rata	Standar Deviasi
DD	483	12,024,877,000.00	402,984,941,000.00	146,303,975,109.73	88,065,476,662.93
BM	483	51,980,727,019.00	1,763,560,497,024.00	402,309,504,547.14	238,660,064,573.78
PE	483	-34.08	107.07	5.4366	5.33748

Berdasar pada tabel 4.3 memperlihatkan bahwa variabel dana desa (DD) di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur memiliki nilai rata – rata sebesar Rp146.303.975.109,7309 dan standar deviasi sebesar Rp88.065.476.662,92840 dengan nilai minimum sebesar Rp12.024.877.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara tahun 2015, sedangkan nilai maksimum sebesar Rp402.984.941.000,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor tahun 2018. Variabel belanja modal (BM) di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur memperoleh nilai rata – rata sebesar Rp402.309.504.547,1443 dan standar deviasi sebesar Rp238.660.064.573,78440 dengan nilai minimum sebesar Rp51.980.727.019,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang tahun 2015, sedangkan nilai maksimum sebesar Rp1.763.560.497.024,00 yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang tahun 2018.

Nilai rata – rata pada variabel pertumbuhan ekonomi (PE) di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur memperoleh nilai sebesar 5,4366% dan standar deviasi sebesar 5,33748% dengan nilai minimum sebesar -34,08% yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018, dan nilai maksimum sebesar 107,07% yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2015.

Uji Normalitas

Jumlah data	483
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	8.643
<i>Asymp.Sig (2-tailed)</i>	0.000

Berdasar hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel 4.4 memperlihatkan nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,000 < nilai signifikansi 0,05, maka data dalam pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Hasil
DD	0.842	1.188	Tidak terdapat masalah multikolinearitas
BM	0.842	1.188	Tidak terdapat masalah multikolinearitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasar hasil pengujian multikolinearitas dalam tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada seluruh variabel independen memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 0,842 dan nilai VIF pada seluruh variabel independen yang sama juga sebesar 1,188. Hasil pada nilai *tolerance* telah melebihi dari 0,1 dan nilai VIF tidak melebihi dari 10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel bebas tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Hasil
DD	0.058	Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas
BM	0.425	Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

Berdasar hasil pengujian dalam tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada variabel dana desa (DD) memperoleh nilai sebesar 0,058 dan variabel belanja modal (BM) memperoleh nilai sebesar 0,425. Kedua hasil nilai signifikansi pada seluruh variabel independen tersebut telah melebihi dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi yang diuji tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Jumlah data	483
DW	1.953
dL	1.84177
dU	1.85851
4-dL	2.15823
4-dU	2.14149
Hasil	Tidak terdapat masalah autokorelasi

Berdasar pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil uji tersebut memperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1,953. Hasil dL dan dU diperoleh melalui tabel *Durbin Watson* dengan kriteria yang digunakan dalam pengujian ini yaitu tingkat signifikansi 0,05, jumlah sampel 483 ($t=480$), dan jumlah variabel independen 3 ($k=3$). Dalam kriteria yang telah diajukan dalam tabel *Durbin Watson* memperoleh nilai dL sebesar 1,84177, nilai dU sebesar 1,85851, nilai 4-dL sebesar 2,15823, dan nilai 4-dU sebesar 2,14149 yang berarti nilai $dU < DW < 4-dU$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis

Hasil yang diperoleh melalui pengujian hipotesis berdasarkan uji analisis regresi berganda dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error
<i>Intercept</i>	0.889862	0.387811
DD	-0.04877	0.026829
BM	0.031971	0.037037

Berdasar hasil pengujian pada tabel 4.8, maka dapat dirumuskan dalam persamaan regresi berganda yang digunakan sebagai berikut:

$$PE = 0,889862 - 0,04877DD + 0,031971BM + \epsilon$$

Dalam persamaan regresi berganda tersebut menjelaskan nilai *intercept* sebesar 0,889862 yang memiliki arti bahwa jika variabel independen dana desa (DD) dan belanja modal (BM) bernilai 0 atau tidak terdapat peningkatan maupun penurunan, maka pertumbuhan ekonomi (PE) bernilai 0,889862. Nilai koefisien regresi pada dana desa (DD) sebesar -0,04877 bertanda negatif memperlihatkan bahwa apabila dana desa (DD) terjadi peningkatan sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan sebesar 0,04877 pada pertumbuhan ekonomi (PE). Selanjutnya, nilai koefisien regresi pada belanja modal (BM) sebesar 0,031971 bertanda positif memperlihatkan bahwa apabila belanja modal (BM) terjadi peningkatan sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan juga sebesar 0,031971 pada pertumbuhan ekonomi (PE).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Jumlah Data	Multiple R	R Square	Adjusted R Square	Standard Error
483	0.08268	0.006836	0.002698	0.161393

Berdasar hasil pengujian pada tabel 4.9 memperlihatkan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,002698 atau 0,2698%. Hasil tersebut memiliki arti bahwa variabel independen yaitu dana desa dan belanja modal dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2698%, sedangkan sisa hasil sebesar 99,7302% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Uji Parsial (Uji t)

No	Hipotesis	Koefisien Regresi	t Hitung	Probabilitas Signifikansi	Prediksi	Temuan
1	Dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2018	-0.04877	-1.8177	0.06974	Positif	Menolak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No	Hipotesis	Koefisien Regresi	t Hitung	Probabilitas Signifikansi	Prediksi	Temuan
2	Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2018	0.031971	0.86322	0.38845	Positif	Menolak

Berdasar hasil pengujian pada tabel 4.10 telah memperoleh hasil pengujian hipotesis bahwa kedua hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Hipotesis pertama yang telah dikemukakan berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pengujian hipotesis yang pertama memperoleh hasil bahwa dana desa (DD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-0,04877$ bertanda negatif dan nilai t hitung sebesar $-1,81766$ tidak melebihi nilai t tabel sebesar $1,645$ serta nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,06974$ melebihi dari $0,05$, maka keputusannya adalah hipotesis pertama yang telah dikemukakan tersebut ditolak sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, pengujian hipotesis yang kedua memperoleh hasil bahwa belanja modal (BM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $0,031971$ bertanda positif dan nilai t hitung sebesar $0,863216$ tidak melebihi nilai t tabel sebesar $1,645$ serta nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,38845$ melebihi dari $0,05$. Dalam hipotesis kedua yang dikemukakan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, maka hipotesis kedua yang dikemukakan dalam penelitian ini ditolak, sehingga memperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh adanya belanja modal.

Pembahasan

Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur periode 2015 sampai dengan 2018, yang dapat ditunjukkan melalui hasil pengujian hipotesis di mana nilai koefisien regresi sebesar $-0,04877$ bertanda negatif dan nilai t hitung sebesar $-1,81766$ tidak melebihi nilai t tabel sebesar $1,645$ serta nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,06974$ melebihi dari $0,05$, maka hipotesis pertama yang dikemukakan ditolak. Berdasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi kemungkinan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dikarenakan pengelolaan dalam pembangunan daerah yang tidak sesuai target atau terdapatnya temuan berupa penyelewengan dana.

Hasil dalam penelitian ini memperoleh hasil yang sejalan dengan penelitian Handayani dan Badrudin (2019), namun tidak bersependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmojo, Fridayani, Kasiwi, dan Pratama (2017) serta Rimawan dan Aryani (2019).

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur periode 2015 sampai dengan 2018, yang dapat dilihat melalui hasil pengujian hipotesis di mana nilai koefisien regresi sebesar 0,031971 bertanda positif dan nilai t hitung sebesar 0,863216 tidak melebihi nilai t tabel sebesar 1,645 serta nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,38845 melebihi dari 0,05 maka hal itu menyebabkan hipotesis kedua ditolak. Berdasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kurang berkualitas kemungkinan dikarenakan pengeluaran dalam belanja modal tersebut kurang diprioritaskan dan diperhatikan dengan baik atau adanya temuan berupa penyelewengan dana.

Hasil penelitian yang diperoleh tersebut mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi dan Suputra (2017), Fajri (2016), dan Sita (2017), namun tidak bersependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurmainah (2013), Astria (2014), Rizky, Agustin, dan Mukhlis (2016), Pambudy dan Syairozi (2019), Senewe, Palar, dan Sumual (2016), Sondakh, Lopian, dan Siwu (2017), serta Hakim dan Wijayanti (2014) yang dikhususkan pada belanja modal yang berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal lainnya memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, berbeda dengan hasil penelitiannya pada belanja modal yang berupa belanja gedung dan bangunan, serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan ini, maka dapat disimpulkan dari penelitian sebagai berikut:

1. Dana desa berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur periode 2015 sampai dengan 2018. Berdasar hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan dapat terjadi dikarenakan pengadaan dana desa tersebut kurang dikelola secara maksimal di mana terdapat pembangunan daerah dalam pengelolaannya yang tidak sesuai target atau terdapatnya temuan berupa penyelewengan dana.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur periode 2015 sampai dengan 2018. Berdasar hasil tersebut, disimpulkan bahwa pengeluaran dalam belanja modal yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur belum mampu untuk memacu meningkatkan pertumbuhan ekonomi disebabkan kemungkinan kurang diprioritaskan dan diperhatikan lebih baik atau adanya temuan berupa penyelewengan dana.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan - keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dikatakan penelitian terbaru disebabkan oleh minimnya jurnal yang dapat menguatkan dalam penelitian yang dilakukan sehingga hanya sedikit referensi jurnal yang diperoleh terutama pada variabel dana desa.
2. Waktu pengamatan pada penelitian ini hanya mencakup 4 tahun, yaitu periode 2015 sampai dengan 2018. Alangkah baiknya apabila untuk menguji dan menganalisa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dibutuhkan waktu yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih kompleks.
3. Beberapa data tidak terdapat jumlah nilainya/kosong.
4. Hasil penelitian yang diperoleh tidak dapat diimplementasikan untuk seluruh provinsi yang berada di Indonesia, dikarenakan dalam penelitian ini hanya dapat diimplementasikan untuk mencakup kabupaten pada Provinsi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur saja.

Saran

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan ini, peneliti bermaksud menyampaikan saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan. Saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah di kabupaten pada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebaiknya dapat mengelola dana desa dan belanja modal dengan baik dan memberikan perhatian besar dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sehingga kebutuhan setiap daerah dapat terpenuhi. Semakin baik pengelolaan tersebut maka dapat mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam daerah tersebut.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
Agar dapat memperoleh hasil yang lebih akurat, maka dapat disarankan untuk memanjangkan waktu pengamatan dalam penelitian. Dalam memperoleh data yang digunakan untuk penelitian disarankan untuk memastikan kelengkapan data. Penentuan variabel bebas yang akan diajukan dapat disarankan untuk menambah atau mengganti yang dapat berpotensi mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga, untuk memperoleh model penelitian yang baik maka disarankan referensi jurnal penelitian yang bertujuan dapat memperkuat topik yang akan diteliti diperbanyak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Astria, S. A. (2014). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12.
- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO*, 5.
- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1745-1773.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi - Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5.
- Hakim, L., & Wijayanti, A. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3.
- Handayani, A. P., & Badrudin, R. (2019). *Evaluation of Village Fund Allocation on Indonesia*. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 283-295.
- Nugroho, F., & Rohman, A. (2012). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 20.
- Pambudy, A. P., & Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8.

Sita, P. R. A. (2017). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 2.

Senewe, J. M., Palar, S. W., & Sumual, J. I. (2016). Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Modal dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Tahun 2005-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16.

Sondakh, G. Y., Lopian, A. L. C. P., & Siwu, H. F. D. (2017). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado (Tahun 2006-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17.

Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Subiyakto, H., & Algifari. (2011). *Praktikum Statistika dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

<http://www.bps.go.id/> Diakses 9 Februari 2020

<http://www.kemenku.go.id/> Diakses 9 Februari 2020

<https://www.spssindonesia.com/> Diakses 18 April 2020